

**SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM
PENGEMBANGAN KABUPATEN SIAK SEBAGAI PUSAT BUDAYA
MELAYU TAHUN 2017**

Eka Wahyuni Roma Fitri

Email : Ekawahyunitromafitri21@gmail.com

Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study aims to find out how the synergy of Siak District Government in developing siak as the center of Malay culture and to know how the implementation of synergy actors involved in developing Malay culture and who are the actors involved in the synergy. This research uses qualitative research methods with descriptive research type, which can be interpreted as problem-solving process investigated by describing the state of the research subject based on the facts that appear during the study which then continued with based on the existing theories.

Siak Regency is one of the autonomous regions in Indonesia which has the authority to plan and manage its development independently, in the long-term development planning (RPJPD) of Siak Regency in 2005-2025, it has formulated the vision and mission to achieve the long-term goals. The long-term development vision of Siak Regency is as the center of Malay Culture in Indonesia that is prosperous and prosperous in 2025, in that vision there is a great determination to realize the ideals as the center of Malay Culture in Indonesia. The grand design of Malay Culture development will integrate various development sectors in realizing Siak Regency as the center of Malay Culture in Indonesia, both from the physical side (facilities and infrastructure) and from non-physical side (values, customs and other cultural products).

Key words : *Synergy, Government, culture, Trully Malay*

A. Latar Belakang Masalah

Studi mengenai kebudayaan saat ini menjadi sorotan dunia terutama lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang disingkat dengan PBB. Melalui UNESCO, PBB memberikan humbuan kepada setiap Negara untuk memperhatikan aspek kebudayaan pada pembangunannya. Hal ini karena budaya merupakan identitas atau jati diri dari suatu daerah. Indonesia memiliki Bergama suku bangsa dan daerah. Kebergaman budaya ini dihargai dan diakui oleh Negara dalam dasar Negara yakni undang-undang Republik Indonesia tahun 1945 visi kebudayaan dimuat dengan sangat luas dan tegas pada pasal 281 ayat(3), pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).

Kabupaten Siak adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang memiliki kewenangan merencanakan dan mengelola pembangunannya secara mandiri, dalam perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD) Kabupaten Siak tahun 2005-2025, telah dirumuskan visi dan berbagai misi untuk mencapai cita-cita jangka panjang tadi. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai pusat Budaya Melayu di Indonesia yang maju dan sejahtera tahun 2025, dalam visi tersebut terkandung tekad besar untuk mewujudkan cita-cita sebagai pusat Budaya Melayu di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka diperlukan sebuah desain besar (*grand design*) yang bersifat *integrated* antar sektor pembangunan dengan kebudayaan menjadi *leading sector*-nya.

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia.

Provinsi Riau adalah Tanah Air Kebudayaan Melayu. Pernyataan tersebut didukung oleh berbagai fakta sejarah yang ada. Provinsi Riau ada beberapa kabupaten, salah satu kabupaten yang mempunyai pariwisata dan kebudayaan yang cukup bagus adalah kabupaten Siak. Kabupaten Siak Sebagai daerah yang berkembang dan mempunyai Slogan yaitu “ Siak The Truly Malay” atau Siak memang merupakan daerah Melayu.

Visi dan Misi jangka panjang untuk dua puluh tahun kedepan di Kabupaten Siak Provinsi Riau telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005 - 2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara’, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan informasi teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

Kabupaten Siak termasuk salah satu kabupaten pemekaran yang berhasil di Indonesia. Peluang untuk lebih maju dan sejahtera terbuka lebar, apalagi didukung oleh hasil sumber daya alam (minyak dan gas) termasuk besar di Indonesia, didukung pula oleh

sumber daya yang terbarukan seperti perkebunan, industri, letak geografisnya yang sangat dekat dengan Selat Melaka, sebagai jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Letaknya yang dekat dengan Pekanbaru, ibukota Provinsi yang merupakan pusat perekonomian dan pendidikan di Sumatera bagian tengah. Sebagian wilayahnya juga dilalui oleh Jalan Lintas Sumatra, membuat daerah ini sangat terbuka untuk semua untuk datang dan berusaha di Siak.

Istana Siak yang berada di Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak, merupakan salah satu simbol kebesaran bangsa Melayu yang mencerminkan tradisi kehidupan hampir sebagian masyarakat Indonesia. Kabupaten Siak memiliki potensi berbagai peninggalan sejarah dan budaya yang harus dilestarikan. Jika merujuk pada sejarah masa lalu, Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang memiliki sejarah panjang tentang eksistensi kerajaan Siak Sri Indrapura. Dalam perjalanan sejarah, kebudayaan Melayu telah menjadi kebudayaan yang majemuk. Kemajemukan kebudayaan Melayu tersebut terungkap dalam berbagai aspek kehidupan diantaranya bahasa, adat istiadat, dan kesenian

Arah Pengembangan Kebudayaan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten siak yaitu :

1. Mengembangkan kebudayaan yang bersumber dari warisan budaya.
2. Merumuskan nilai-nilai kebudayaan terhadap totalitas perilaku kehidupan ekonomi,

politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.

3. Mengembangkan kebebasan berekreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika dan agama.
4. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Kabupaten Siak sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya ke luar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa.
5. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

Sasaran yang akan dicapai pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam program Pengembangan Kebudayaan adalah:

1. Berkembangnya Nilai budaya kabupaten siak dari warisan budaya.
2. Perlindungan dari kepunahan yang meliputi penyelamatan, pemeliharaan budaya.
3. Berkembangnya kebebasan berekreasi dalam Kesenian.
4. Pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Tersusunnya inventarisasi dan dokumentasi warisan budaya.

Untuk memahami dan mengetahui potret perkembangan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak maka diidentifikasi beberapa masalah dalam pengembangan Budaya Melayu di Kabupaten Siak yaitu :

1. Belum optimalnya Pengembangan nilai-nilai, sikap mental dan prilaku masyarakat.
2. Apresiasi masyarakat terhadap budaya produk masih rendah.
3. Belum maksimalnya Peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan pengelolaan cagar budaya.
4. Kurangnya Pengetahuan masyarakat tentang Kampung Budaya.
5. Harus adanya Pelestarian dari Pemerintah daerah tentang Museum Budaya.

Menurut filsafat kebudayaan, ilmu kebudayaan mempelajari peristiwa dan bentuk bentuk kebudayaan yang terdapat pada kesatuan social nerdeda-beda menurut ruang dan waktu, filsafat kebudayaan mendekati hakekat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia yang untuk sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris, dimensi sejarah, dan setempat, filsafa kebudayaan memandang dari realisasi kemanusiaan. (J.V. Schall S.J dalam Baker, 1984).

Budaya adalah sebuah temuan (invensi) yang lahir dari akal budi manusia dalam merespons kehidupan. Kuatnya akar budaya tidak sekedar penopang dalam kehidupan, melainkan juga sebagai sarana menahan intervensi berbagai kebudayaan asing yang bisa

jadi dapat menjadi penggerus budaya itu sendiri..

Williams mendefinisikan konsep budaya menggunakan pendekatan universal, yaitu konsep budaya mengacu pada makna-makna bersama. Makna ini terpusat pada makna sehari-hari: nilai, benda-benda material/symbolis, norma. Kebudayaan adalah pengalaman dalam hidup sehari-hari: berbagai teks, praktik, dan makna semua orang dalam menjalani hidup mereka (Barker, 2005: 50-55). Koentjaraningrat memberikan definisi budaya sebagai sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1990: 180). Budaya secara luas adalah proses kehidupan sehari-hari manusia dalam skala umum, mulai dari tindakan hingga cara berpikir, sebagaimana konsep budaya yang dijabarkan oleh Kluckhohn.

Program pembangunan Kebudayaan Nasional meliputi bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata yang masing-masing memiliki tujuan spesifik. Di bidang kebudayaan dan kesenian dengan prioritas program pelestarian dan pengembangan kebudayaan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya, dan memperkuat keketahanan budaya.

Program pengelolaan kekayaan budaya dilakukan dengan serangkaian kegiatan yaitu:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya (keikutsertaan tim kesenian dan kafilah Siak pada acara MTQ)
2. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
3. Pengembangan nilai dan geografi sejarah (pemeliharaan dan pengelolaan Istana dan Balai Kerapatan Tinggi Siak)
4. Rehab Sedang/Berat Rumah Peninggalan Bersejarah (Rehab Sedang/Berat Rumah Datuk Pesisir, datuk kampar dan makam Tosido)
5. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian bangunan makam raja kecil
6. Event kesenian di luar Kabupaten Siak
7. pengelolaan / pelindungan Benda-Benda Cagar Budaya (perawatan dan pemugaran benda-benda cagar budaya).

Program pengelolaan keragaman budaya dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain:

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah (peningkatan nilai-nilai kesenian daerah meliputi seni tari, musik dan teater, pemberian bantuan alat musik seperti kompang, gambus, gong, gamelan, wayang kulit, pakaian tari dan pakaian adat melayu, pembuatan DVD lagu-lagu daerah, pembuatan pasar seni, pembangunan gedung kesenian dan pembangunan gedung tenun siak

2. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah (penyelenggaraan festival Siak Bermadah), festival Muharam (kegiatan Ghatib Beghanyut dan pagelaran Siak Tempo Dulu)
3. Parade tari tingkat provinsi
4. Pengembangan musik orkestra.

Sedangkan program pengembangan nilai budaya dilakukan melalui kegiatan antara lain:

1. pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah (penyusunan grand design budaya Melayu di Kabupaten Siak)
2. Adanya mata pelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu dan Tulis Arab Melayu pada semua tingkat sekolah mulai SD sampai SMU serta kegiatan ekstrakurikuler pelestarian seni tari dan musik Melayu
3. Pembinaan organisasi paguyuban, LAMR Kabupaten Siak, LAMR Kecamatan, Puja Kusuma, IKJR, IKMR, IKBR, Missouri Jawa Barat dan lain-lain. Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si bersama sejumlah pemimpin daerah dan budayawan Indonesia dalam Kongres Budaya Indonesia 2013 di Jogjakarta Bupati Siak Drs H Syamsuar M.Si bersama sejumlah pemimpin daerah dan budayawan Indonesia dalam Kongres Budaya Indonesia 2013 di Jogjakarta.

Permasalahan penelitian ini adalah Dalam era otonomi daerah, pengelolaan kekayaan budaya menjadi

tanggung jawab pemerintah daerah. Kualitas pengelolaan yang rendah tidak hanya disebabkan oleh kecilnya kapasitas fiskal, namun juga kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah daerah terhadap kekayaan budaya. Pengelolaan kekayaan budaya ini juga masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Sementara itu, apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri masih rendah, antara lain karena keterbatasan informasi.

Dari kondisi yang ada di kabupaten Siak Penulis menemukan Fenomena-Fenomena sebagai berikut :

1. Sasaran pokok yang ingin dicapai dari yaitu meningkatnya upaya pengembangan nilai budaya, dan pengelolaan kekayaan budaya serta keragaman budaya, dan terwujudnya Istana Siak sebagai pusat budaya melayu yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya melayu
2. Arah kebijakan yang diambil meliputi penguatan partisipasi masyarakat dan peran institusi kebudayaan, pengamalan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat, pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan, pengembangan dan pembinaan kebudayaan Melayu melalui pendidikan, menjadikan Istana Siak sebagai pusat budaya Melayu yang didukung oleh pilar-pilar berupa pusat-pusat pengembangan budaya masyarakat

3. Melestarikan dan mengembalikan fungsi Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya. Mengembangkan budaya Melayu untuk mendukung pariwisata. Menjadikan Siak sebagai the truly malay dan heritage city serta memasukkannya di dalam Malay Culture Map tingkat Asia Tenggara

Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Mengembangkan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana Sinergitas Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu Tahun 2017?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitaian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan hubungan pemerintahan daerah dengan masyarakat dalam mengembangkan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman penulis dan pembaca dalam lingkup Kebudayaan Melayu dan

khususnya Kebudayaan Melayu Kabupaten Siak yang masih terjaga hingga saat ini.

- b. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam memberikan acuan, informasi kepada pihak lain untuk melakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut tentang Kebudayaan Melayu Khususnya dan Kebudayaan Lain Umumnya.
- c. Dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau evaluasi tempat penelitian dalam meningkatkan dan mengembangkan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Kabupaten Siak.

D. Tinjauan Teoritis

Dalam penelitian, yang disebut teori adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung dan memecahkan persoalan atau suatu masalah. Teori merupakan rangkaian konsep - konsep, definisi - definisi, yang saling berhubungan yang memberikan pandangan sistematis mengenai gejala dengan merincikan hubungan antara variabel dengan tujuan menjelaskan gejala tersebut.

Agar lebih sistematis berikut penjabaran kerangka teori dalam penelitian ini :

1. Studi Terdahulu

Dari tinjauan pustaka studi terdahulu, Skripsi oleh Triannanda Putri dengan judul “Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Pengembangan Kebudayaan Melayu

Tahun 2008-2013” menyimpulkan bahwa pusat kebudayaan melayu yang dimaksudkan sebagai refleksi dari peradaban tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat kota pekanbaru yang mantap dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, mengamalkan serta menumbuhkan kebudayaan budaya Melayu.¹ Landasan teori yang di pakai penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dimana menurut Suharno (2010:31) kerangka kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel. Dan strategi ini hanya terfokus pada penampilan fisik tanpa memperhatikan unsur nilai yang terkandung didalamnya. Pelaksanaan strategi dari kebijakan hanya terkesan sebagai formalitas untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintahan dan belum mencerminkan keseriusan untuk mencapai visi kota pekanbaru sebagai pusat kebudayaan melayu 2008-2013.

Studi Terdahulu dari jurnal Indonesian Journal of Conservation Vol. 2 No. 1-Juni 2013 Hlm. 51-59 penelitian oleh Gun Faisal, Dimas Wihardyanto dengan judul “Selembayung sebagai identitas kota pekanbaru: kajian Langgam Arsitektur Melayu”. Menyimpulkan bahwa tradisi kebudayaan merupakan hal yang wajib kita lestarikan, karena itu merupakan akar budaya dan identitas lokal yang harus kita pertahankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yang menjelaskan tingkat penggunaan langgam arsitektur melayu khususnya selembayung pada bangunan.

¹ Jurnal DR. Hasanuddin, Msi, Triannanda Putri, 2013. *Strategi Pemerintah kota pekanbaru dalam*

2. Sinergitas

Menurut Covey yang dikutip melalui jurnal pembangunan pada student jurnal mengartikan sinergisitas sebagai: “Kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar daripada dikerjakan sendiri-sendiri, selain itu gabungan beberapa unsur akan menghasilkan suatu produk yang lebih unggul. Oleh sebab itu, sinergitas dalam pembangunan berarti keterpaduan berbagai unsur pembangunan yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar.

Covey meambahkan sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang ada mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai”

Silower (1998) dalam buku “synergy Trap” mengemukakan dasar-dasar sinergi yang terdiri dari visi strategi, strategi budaya, kekuasaan dan budaya, integrasi sistem dan investasi awal untuk memperoleh imbalan sebagai premi.

Najiyati dan Rahmat mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dalam Rahmawati (2014:3). Sedangkan menurut wahab sinergi diartikan sebagai interkoneksi dan integrasi antar aktor umum dan swasta, bersama dengan keseimbangan pembagian tugas antara para birokrat dan masyarakat setempat yang telah di sepakati sebelumnya.

Melalui dua kesimpulan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa sinergitas dapat diartikan kegiatan gabungan atau kerjasama yang

dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran yang berbeda namun terkait didalamnya. Oleh karena itu seluruh komponen masyarakat dan pemerintah diharapkan bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

a. Konsep Sinergitas

Berdasarkan pendapat Freeman dalam Selviyanna (2010:42) *stakeholder* dapat didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Definisi sempitnya *stakeholder* dapat diartikan sebagai suatu kelompok dan individu kepada siapa sebuah organisasi bergantung untuk mempertahankan keberadaannya. Sedangkan dalam definisi luas, *stakeholder* didefinisikan sebagai kelompok individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian suatu tujuan. Yau dkk dalam Selviyanna (2010:43) berpendapat bahwa :

Stakeholder adalah semua pihak, baik internal ataupun eksternal yang memiliki hubungan mempengaruhi maupun dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh suatu perusahaan.

Pendapat lain tentang *stakeholder* menurut Jalal dalam selviyanna (2010:43) bahwa *stakeholder* adalah orang-orang atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh suatu hal, serta mereka yang mungkin memiliki kepentingan dalam proyek dan atau kemampuan untuk mempengaruhi hasil, baik positif atau negatif.

1. Kebudayaan

Dalam suasana dinamis, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka berkehidupan masyarakat yang di jadikan milik diri manusia dengan cara Belajar (Koentjaningrat, 2009).²

2. Pembangunan Pariwisata

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Siagian dalam Hadiawan (2006:11) pembangunan merupakan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Sedangkan Kartasasmita (1994:121) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari beberapa pengertian pembangunan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan

adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun sosial yang bertujuan kearah yang lebih baik melalui upaya yang sudah direncanakan. Dan merupakan sebuah tranformasi atau perubahan ekonomi, sosial dan budaya yang di gerakkan atas tujuan atau strategi yang diinginkan yang berguna untuk peningkatan kualitas manusia dalam mempebaiki kualitas hidupnya.

2. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata berasal dari Bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti berulang-ulang atau berkali-kali, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pengertian pariwisata menurut Norval dalam Yunida (2010:20) adalah keseluruhan kegiatan yang berhubungan dengan masuk, tinggal, dan pergerakan penduduk asing di dalam atau di luar suatu negara, kota, atau wilayah tertentu.

Menurut definisi yang lebih luas

3. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan dalam bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta

²Koentjaningrat. 1987. *Kebudayaan, Mentalis, dan Pembangunan*, PT. Gramedia: Jakarta

memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil kerajinan daerah untuk dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, dan yang tak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD).

Melakukan pembangunan pariwisata dibutuhkan berbagai pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan. Antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata. Suatu kegiatan pembangunan pariwisata yang sudah baik tanpa adanya dukungan dari hal-hal tersebut diatas tidak mungkin dapat mencapai hasil yang diharapkan, artinya setiap pengembangan bidang pariwisata sangat membutuhkan dana serta SDM yang berkualitas disamping ditunjang adanya sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah.

Spillane menambahkan pengembangan pariwisata akan menghasilkan akibat yang lebih luas daripada akibat ekonomis saja. Oleh karena itu dibutuhkan pembinaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari pembinaan pembangunan pariwisata adalah:

- a. Menggalakan pemeliharaan segi-segi positif yang berupa kegiatan-kegiatan atau sikap dan sifat langsung atau tidak langsung dari masyarakat bagi pengembangan masyarakat itu sendiri dan kepariwisataan.
- b. Menggalakan usaha-usaha pencegahan pengaruh buruk yang mungkin timbul sebagai akibat

pengembangan pariwisata, atau setidaknya tidaknya membatasi pengaruh tersebut sekecil-kecilnya.

4. Kerjasama

Guna meningkatkan mutu kepariwisataan diperlukannya kerjasama. Kerjasama ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki andil dalam proses pembangunan serta pihak-pihak yang akan merasakan dampak dari pembangunan pariwisata. Hal ini dilakukan agar terwujudnya tujuan awal yang diharapkan saat terjadinya kerjasama. Melalui konsep kerjasama ini kita dapat mengetahui bagaimana prinsip-prinsip kerjasama agar pelaksana kerjasama melaksanakan peran masing-masing anggota yang sesuai dengan latar belakang peran yang mereka miliki.

Menurut Suit (1996:88) kerjasama dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menghimpun kekuatan guna menyelesaikan pekerjaan berat dan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu orang. Mereka menambahkan kerjasama yang positif sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah teknis pekerjaan dan berbagai masalah intern organisasi. Selain itu kerjasama ini juga dapat meningkatkan pelayanan terhadap relasi atau pelanggan yang dapat digunakan sebagai banteng pertahanan dalam menghadapi persaingan.

Agar tidak timbul masalah dalam suatu kerjasama pemimpin tertinggi

harus benar-benar memperhatikan dan cepat tanggap bila ada guncangan atau keretakan terjadi. Keretakan atau guncangan yang terjadi baik dari tingkat bawah maupun atas akan tetap berpengaruh terhadap kegiatan. Agar tidak terciptanya keretakan pemimpin diharapkan memiliki prinsip-prinsip kerjasama diatas sehingga segala sesuatu yang dianggap tidak baik dapat tercegah sebelum terjadi.

Sedangkan Menurut Pamudji (1985:12). Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama

Sedangkan menurut Abdulsyani (2012:156), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. Kerja sama merupakan suatu proses sosial yang paling dasar. Kerjasama timbul apabila orang mulai menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama

BAB 111

SINERGITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM MENGEMBANGKAN KABUPATEN SIAK SEBAGAI PUSAT BUDAYA MELAYU TAHUN 2017

A. Sinergitas Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Kebudayaan Melayu merupakan salah satu tujuan dari pemerintah Kabupaten Siak yang tercantum pada Visi Tahun 2025. Sinergitas yang terkait dalam pengembangan Budaya Melayu yaitu Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Pendapatan Daerah dan Bappeda Kabupaten Siak, Lam Kabupaten Siak dan tak kalah penting nya pelaku-pelaku seni dan budaya serta dukungan dari masyarakat Kabupaten Siak sendiri guna mewujudkan pengembangan pusat budaya melayu dan menjadikan kebudayaan melayu asean. Permasalahan kebudayaan harus dilakukan melihat dunia melayu di era globalisasi menghadapi tantangan yang sangat problematic.

faktor eksternal itu adalah globalisasi, modernisasi, kapitalisme, hedonism, pragmatis , hegomoni, kolonilisasi dan lain-lain. Dalam menjalankan koordinasi antara kebudayaan melayu dan dinas terkait ada sedikit kesulitan melakukan penyamaan persepsi dan waktu yang sesuai dengan semua pihak.

1. Dinas Kebudayaan dengan Pariwisata dalam pengembangan budaya melayu kabupaten siak

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak tentang

tugas pokok dan fungsi dinas kebudayaan dalam melaksanakan tugas nya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan
4. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
6. Melaksanakan tugas yang lain diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran institusi dinas kebudayaan diatas jelas sudah bahwa kerja sama dan dukungan untuk mengembangkan kebudayaan dan memantapkan jati diri harus bisa dilakukan dengan cara saling membahu-bahu dalam mencapainya untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kebudayaan melayu perlu ada ketahanan jati diri yang tinggi untuk dapat mengelakkan krisis identitas ,sebagai kekuatan yang kokoh untuk mempertahankan benteng melayu .

2. Dinas Pendapatan Daerah dengan BAPPEDA kabupaten siak

Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Siak memiliki nilai historis yang tinggi, karena merupakan bekas kerajaan siak yang berdiri pada tahun 1723. Sejak awal Pemerintah Kabupaten siak memandang bahwa budaya melayu merupakan pilar pembangunan. Salah satu yang telah disusun adalah buku Grand design pengembangan budaya melayu di Kabupaten Siak. Inilah salah satu referensi grand design budaya melayu diprovinsi riau dan bahkan mungkin diindonesia.

Keberadaan grand design ini teramat penting, sebagai acuan dan tujuan saat menyusun kebijakan karena jika membangun tanpa perencanaan, bagai mendirikan rumah tanpa tiang. Keseriusan Pemerintah Daerah kabupaten Siak dalam pengembangan Budaya melayu, dibuktikan dalam visi RPJPD tahun 2005-2025 yakni sebagai pusat budaya melayu diindonesia yang maju dan sejahtera. Adapun misi grand design pengembangan budaya melayu di Kabupaten Siak diantaranya mengembangkan sikap mental dan perilaku msyarakat didasarkan pada nilai-nilah budaya melayu. Baik melalui pendidikan formal, informal dan non formal.

Membangun, mengelola dan mengembangkan permuseuman untuk menyimpan dan melestarikan berbagai peninggalan sejarah dan budaya dikabupaten siak Pemerintah Daerah kabupaten siak juga telah melakukan restorasi, rehabilitasi dan melakukan pemeliharaan bangunan seta situs budaya. Seperti pada bangunan gedung, telah dilakukan frestorasi Istana Siak dan kawasan disekitarnya. Selain itu restorasi balai kerapatan tinggi, tangsi

belanda dan masjid raya syahbuddin. Untuk makam, telah dilakukan restorasi makan raja kecil, makam koto tinggi, makan sultan syarif kasim II, makan datuk-datuk empat suku, makan putrid kaca mayang, malam mahrum mrmpura dan makan sultan yahya di dungun trengganu.

Dinas BAPPEDA

Dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan Melayu perlu adanya suatu pola yang terintegrasi dengan baik antar instansi pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Sinergitas dapat terbangun melalui dua cara, antara lain komunikasi dan koordinasi.

1. Komunikasi

Dalam rangka menghasilkan hubungan yang sinergi maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik, karena pada dasarnya sinergitas akan terjadi apabila terjadi koordinasi dan komunikasi yang baik antara keduanya. Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi seperti yang dinyatakan bahwasannya dalam komunikasi dibutuhkan koordinasi. Komunikasi merupakan cara yang digunakan sumber untuk menyampaikan informasi dan kemudian si penerima pesan memberikan rangangan atas informasi yang disampaikan.

2. Koordinasi

Sinergitas yang dibangun selain komunikasi juga perlu adanya koordinasi. Koordinasi dalam mencapai sesuatu yang selayaknya harus ada antara instansi Pemerintah yang terkait, Dinas Kebudayaan dan masyarakat serta seniman yang ada di

Kabupaten Siak ini. Kurang adanya koordinasi yang efektif dalam tujuan bersama untuk mengembangkan Budaya Melayu akan mempengaruhi sinergitas antara dinas yang terkait.

3. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sumber Daya Manusia (*Staff*)
- b. Anggaran (*Budgetary*)
- c. Fasilitas (*Facility*)
- d. Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)

B. Sinergitas Masyarakat dalam Mengembangkan Budaya Melayu

1. Masyarakat dengan Pemuda dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Pelaku yang dilibatkan dalam perencanaan dan kebijakan kebudayaan ini ialah pelaku-pelaku seni dan budaya, lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, seniman, dan stake holder yang berhubungan langsung dengan masalah kebudayaan di lingkungan Pemerintah . Masyarakat hanya mengambil peran sebagai aktor pendukung dan penyatuan kebudayaan dalam Mengembangkan Budaya Melayu Kabupaten Siak sendiri ditingkat global. Pemuda yang dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan dan ada tindakan untuk mencapainya. Dalam perjalanan mencapai tujuan terdapat pilihan-pilihan dan sebuah strategi untuk pencapaiannya yang baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan

.disini pemerintah melibatkan masyarakat yang menjadi peran penting dalam dukungan actor ini ialah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ialah para budayawan, seniman, dan actor seni serta masyarakat daerah.

2. Masyarakat dengan LAM Kabupaten Siak dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Masyarakat Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan budaya Melayu menjadi pendukung bagi stalkholder yang terkait. Dimana masyarakat dari awal proses perencanaan hingga terwujudnya Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu. Hal ini menuju agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan masyarakat akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat.

Lembaga adat melayu merupakan lembaga yang terjadi tombak pengembangan masalah kebudayaan melayu di Kabupaten Siak, LAM bertanggung jawab atas nilai adat istiadat serta aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah, bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni atau

nilai social budaya daerah dan dilingkungan pemerintahan, pendidikan bahkan dikalangan masyarakat pada umumnya.

3. LAM Kabupaten Siak dengan Pemuda dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Pemuda diharapkan mampu memberikan apresiasi yang cukup besar terhadap kebudayaan bangsa karena campur tangannya pemuda masyarakat yakin bahwa warisan bangsa akan cepat tersampaikan melihat daya tangkap dan kreatifitas pemuda sangatlah tinggi. namun, hal itu tidak akan tercapai bila tidak ada kesadaran dari pemuda itu sendiri. ditambah dengan pengaruh budaya luar yang sangat cepat sehingga budaya sendiri terlupakan.

C. Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam Mengembangkan Budaya Melayu

1. Dinas Kebudayaan dengan Masyarakat dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Masyarakat Adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengembangan budaya Melayu menjadi pendukung bagi stalkholder yang terkait. Dimana masyarakat dari awal proses perencanaan hingga terwujudnya Kabupaten Siak sebagai pusatbudaya Melayu. Hal ini menuju agenda peningkatan optimalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada era globalisasi seperti saat ini semakin memiliki nilai strategis. Hal ini cukup penting, mengingat dari rangkaian pembicaraan yang terjadi, diharapkan masyarakat

akan memunculkan pemikiran-pemikiran, ide-ide, serta gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif serta berwawasan ke depan bagi kemajuan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat.

2. Dinas Pariwisata dengan Pemuda dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Masa depan bangsa Indonesia sangat ditemukan oleh para generasi muda. Setiap pemuda Indonesia baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor penting yang sangat mempertahankan kedaulatan bangsa. Mudah mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan suatu daerah dengan semangatnya yang menggebu dan idealis. Kebanyakan pemuda adalah yang banyak dibutuhkan oleh berbagai institusi karena pemuda mempunyai otak yang luar biasa dalam berfikir, bersikap kritis serta mempunyai daya kreatifitas tinggi.

3. Dinas Kebudayaan dengan LAM Kabupaten Siak dalam Mengembangkan Budaya Melayu

Lembaga adat melayu merupakan lembaga yang terjadi tombak pengembangan masalah kebudayaan melayu di Kabupaten Siak, LAM bertanggung jawab atas nilai adat istiadat serta aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah, bertanggung jawab atas rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni atau nilai social budaya daerah dan dilingkungan pemerintahan, pendidikan bahkan dikalangan masyarakat pada umumnya.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan kebudayaan Melayu masih belum berjalan dengan efektif. Dimana belum maksimalnya kerjasama untuk mewujudkan Kabupaten Siak di tahun 2025 Mendatang.
2. Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengadakan Event-Event bertaraf Nasional diperlukannya Kerjasama agar terwujudnya tujuan awal untuk Mengembangkan Budaya Melayu Kabupaten Siak.
3. Dinas Pariwisata harus Mempromosikan warisan Budaya Melayu guna Menunjang minat Wisatawan Mancanegara guna Meningkatkan Kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siak.
4. Dinas kebudayaan kini mulai bisa bergerak dan berdiri di kedinasan tersendiri serta dibentuknya bidang yang bergerak fokus untuk masalah yang terkait dengan master plan Kabupaten Siak tahun 2025 sehingga konsep kerjasama yang akan dirancang masih dalam tahap pembahasan di internal Dinas kebudayaan.
5. Dinas kebudayaan menjadikan kebudayaan melayu sebagai prioritas dalam memajukan pembangunan Kabupaten Siak yang akan berbasis Budaya Melayu . Kerjasama sama yang terjalin kini

hanya antara antara Dinas kebudayaan dan Pariwisata.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka peneliti berusaha memberikan saran demi tercapainya progress terhadap sinergitas guna memajukan pengembangan dan pembangunan Melayu di Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan upaya-upaya dalam melakukan kerjasama yang intensif antara stakeholder yang bertanggung jawab atas permasalahan kebudayaan dengan pelaku budaya, lembaga budaya, seniman serta masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam Sumber daya manusia dan begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Siak yang hendaknya akan dilibatkan dalam pencapaian sinergitas pembangunan kebudayaan Melayu untuk tercapainya Master Plan Riau 2025 mendatang.
2. Keterlibatan masyarakat dalam sebuah sinergitas pembangunan harus lebih dijalin dan optimalisasikan dalam melakukan kerjasama, karena masyarakat merupakan gagasan pokok dalam sebuah kebudayaan yang nantinya bisa menyumbangkan ide-ide, gagasan, dan kreativitas dalam kebudayaan.
3. Dalam menjalankan keberhasilan perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam sebuah perencanaan, Oleh karena itu dengan adanya sinergitas yang baik instansi yang terkait bersama dalam budaya melayu bisa menjadi

jembatan untuk memfasilitasi segala bentuk kerjasama.

4. Peran Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau dan dinas kebudayaan harus dapat dioptimalkan karena eksistensi kedua lembaga ini akan mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pengembangan serta pelestarian kebudayaan melayu.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni, Marleily, 1984. *Sejarah Pendidikan Daerah Riau*, Departemen dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah. Jakarta : Gramedia
- Abu Bakar, Abdullatif, 2001. *Adat Melayu Serumpun*, Perbadanan Muzium Melaka PERZIM : Melaka
- Abdullah, Irwan, 2010 *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Deliarnov, 2006. *Ekonomi Politik*. Erlangga : Jakarta.
- Ishaq, Isjoni, 2002. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Pekanbaru : Unri Press.
- Ikram Jamil, Taufik, Syaukani Al Karim, dan Ferendi Lahamid, 2002. *Ikhtisar Budaya Melayu Riau*. Pekanbaru : Yayasan Pustaka Riau.
- Koentjaraningrat, dkk, 2007. *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam*

Perubahan, Adicita Karya
Nusa : Jakarta.

Koentjaraningrat, 1987. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.

Maleha aziz, dkk, 2007. *Sejarah Kebudayaan Melayu*, Pekanbaru : Cendikia Insani.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo, 2011. *Sinergitas Instansi Pemerintah dalam Pembangunan*, Yogyakarta : Bumi Aksara.

Nizami Jamil ,dkk, 2011. *Sejarah Lembaga Adat Melayu Riau, Lembaga Warisan Budaya Melayu Riau*, Pekan baru : CendikiaInsani.

Maleha aziz, dkk, 2007. *Sejarah Kebudayaan Melayu*, Pekanbaru : CendikiaInsan.

Zen Yoserizal, Yuana Yatna, Asri. 2010. *Direktor Budaya Melayu Riau (Bengkalis, Siak Sri Inderapura, Rokanhilir, Indragirihulu)*. Pekanbaru : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau.

Tim Penulis Sejarah Kerajaan Siak. *Sejarah kerajaan Siak*. Siak : Lembaga Warisan Budaya Melayu Siak.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pelestarian Budaya Melayu Kabupaten Siak

Jurnal

Dr. Khairul Anwar,M.Si, Ermanita, 2013. *Sinergitas Pembangunan Kebudayaan Melayu (Studi Dunia Melayu Islam) Provinsi Riau*2014-2016.

Grand Design Pengembangan Budaya Melayu Di Kabupaten Siak

Drs.H. Syamsuar, Msi, 2013. *Peran Pemerintah Kabupaten Siak dalam Pelestarian Kebudayaan, Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Siak.*

Sufian, Hanim, 2005. *Manajemen Strategi dalam Pembangunan.* Pekanbaru : UIR Press,

Elmustian, Rahman, 2003. *Alam Melayu : Sejumlah Gagasan Menjemput Keagungan,* Pekanbaru : Unri Press.

Skripsi

Jeffry Khusharyadi, 2011 :
“Pengelolaan Objek Wisata Di Kecamatan Siak Kabupaten Siak” .

Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau, Pekanbaru.

Ermanita, 2013 : “Sinergitas Pembangunan Kebudayaan Melayu Tahun 2014-2016”.

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik